



Manajemen Keuangan Pesantren di Era Society 5.0: Analisis Rasionalisasi dan Disiplin Pasar (Weber)

Muh. Hanif

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
muh.hanif@uinsaizu.ac.id

Nur Indah Alfiyana

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
nurindahalfiyana@gmail.com

Abstrak

Prinsip rasionalisasi dan disiplin pasar dari kerangka sosioekonomi Max Weber digunakan untuk menganalisis bagaimana pesantren di Indonesia telah mengubah manajemen keuangan mereka dalam mempersiapkan era Masyarakat 5.0. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Pesantren Darul Abror di Purwokerto. Berdasarkan temuan, pesantren telah meningkatkan sistem keuangan mereka dari model sederhana berbasis kepercayaan menjadi model yang lebih kontemporer yang menggabungkan pembayaran dan pencatatan digital serta unit bisnis baru. Siswa belajar tentang kewirausahaan dan membantu pesantren menjadi lebih mandiri secara finansial melalui unit komersial pesantren, yang meliputi kios, koperasi, kafe, dan penyedia jasa lainnya. Selain itu, untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam hal keuangan, pesantren telah menetapkan SOP. Transformasi tersebut menunjukkan perpaduan antara modernisasi ekonomi dan nilai-nilai keagamaan yang tetap dipertahankan dalam pengelolaan pesantren.

Kata Kunci: manajemen keuangan pesantren; rasionalisasi formal; rasionalisasi substantif; disiplin pasar; era society 5.0

Abstract

The rationalisation and market discipline principles from Max Weber's socioeconomic framework are used to analyse how Islamic boarding schools in Indonesia have changed their financial management in preparation for the Society 5.0 era. The study used qualitative approaches such as observation, interviews, and documentation based on field research conducted at the Darul Abror Islamic Boarding School in Purwokerto. Based on the findings, Islamic boarding schools have upgraded their financial systems from a trust-based, simplistic model to a more contemporary one that incorporates digital payments and records as well as new business units. Students learn about entrepreneurship and help Islamic boarding schools become more financially self-sufficient via Islamic boarding schools' commercial units, which include booths, cooperatives, cafés, and other service providers. Also, in order to be more open and accountable with their finances, Islamic boarding schools have established standard operating procedures (SOPs). This transformation demonstrates the fusion of economic



modernization and religious values that are maintained in Islamic boarding school management.

Keywords: *islamic boarding school financial management; formal rationalization; substantive rationalization; market discipline; society 5.0 era*

PENDAHULUAN

Kita hidup di era Masyarakat 5.0, di mana teknologi terus dikembangkan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, di era Masyarakat 5.0 ini, kita juga dapat menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Kita memasuki era Masyarakat 5.0, yang akan membentuk cara masyarakat beroperasi di masa depan. Dipercaya bahwa masyarakat yang lebih maju dapat dicapai dengan merangkul gagasan Masyarakat 5.0, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan teknologi dan kebutuhan sosial (Ulya & Nikmah, 2024).

Dengan munculnya teknologi digital yang berpusat pada manusia, periode yang dikenal sebagai Masyarakat 5.0 membawa perubahan mendalam pada beberapa aspek kehidupan. Pesantren dan lembaga pendidikan lainnya harus beradaptasi dengan teknologi baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam yang membentuk identitas mereka dalam menghadapi perubahan ini. Sebagai pilar pendidikan Islam di Indonesia, pesantren berada di bawah tekanan untuk mencapai efisiensi dan merasionalisasi manajemen keuangan dalam menghadapi disrupsi digital yang dibawa oleh era Masyarakat 5.0. Era ini menuntut integrasi teknologi digital ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk sistem manajemen keuangan. (Cover, 2025). Perubahan pola masyarakat menuju sistem digital menyebabkan lembaga pendidikan dituntut untuk memiliki tata kelola yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi keuangan dinilai mampu mempermudah pencatatan transaksi, pengawasan dana, serta meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pesantren. Namun, tidak semua pesantren memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun budaya organisasi yang mendukung

transformasi digital secara menyeluruh. Sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, pesantren mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dari lembaga pendidikan formal lainnya.

Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto merupakan salah satu pesantren yang masih menggunakan sistem pengelolaan keuangan berbasis manual dan transaksi tunai dalam aktivitas administrasinya. Meskipun belum menerapkan sistem pembayaran *cashless* maupun akuntansi digital secara penuh, pesantren tetap berupaya menjaga efektivitas pengelolaan dana melalui pencatatan administrasi yang teratur, pengembangan unit usaha pesantren, serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah dan kemaslahatan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa adaptasi pesantren terhadap era Society 5.0 tidak selalu diwujudkan melalui digitalisasi total, melainkan melalui proses penyesuaian yang tetap mempertahankan nilai-nilai religious dan budaya pesantren. Dalam perspektif sosiologi ekonomi Max Weber, perubahan sistem pengelolaan keuangan dapat dipahami melalui konsep rasionalisasi, yaitu proses perubahan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih terorganisasi, efisien, dan terukur. Rasionalisasi dalam pesantren tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital, tetapi juga menyangkut perubahan tata Kelola kelembagaan dan strategi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto melakukan adaptasi dan transformasi manajemen keuangan di tengah tuntutan era Society 5.0 tanpa meninggalkan identitas tradisional pesantren.

Studi terdahulu tentang manajemen keuangan pesantren berfokus pada usaha mikro atau sekadar donasi, belum mendiagnosis secara mendalam bagaimana pesantren menundukkan



diri pada disiplin pasar sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam bingkai teoretis tentang rasionalisasi ala Weber (Harjawati et al., 2026). Namun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung menempatkan transformasi ekonomi pesantren pada aspek praktis dan administrative semata. Padahal, perubahan sistem ekonomi digital menuntut lembaga pendidikan, termasuk pesantren untuk menerapkan tata kelola keuangan yang lebih rasional, efektif, dan terukur. Akan tetapi, dalam konteks pesantren proses rasionalisasi tersebut tidak selalu berjalan secara penuh karena masih dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya tradisional yang menjadi identitas lembaga.

Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto menjadi salah satu contoh pesantren yang masih mempertahankan sistem pengelolaan keuangan konvensional tanpa penerapan *cashless system* secara menyeluruh. Meskipun demikian, pesantren tetap melakukan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi modern melalui penguatan administrasi keuangan, pengembangan unit usaha, dan pengelolaan dan berbasis prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi pesantren terhadap modernisasi ekonomi berlangsung secara bertahap dan selektif, bukan melalui penyeragaman total terhadap logika pasar modern.

Penelitian ini merespons dengan analisis sosiologi ekonomi Max Weber, dengan tiga tujuan: (1) menguji adopsi teknologi akuntansi digital sebagai rasionalisasi formal; (2) mengidentifikasi diversifikasi bisnis, wakaf produktif, dan *cashless system* sebagai rasionalisasi substantif social-etis; dan (3) mengeksplorasi adaptasi pragmatis terhadap disiplin pasar ketika pesantren menghadapi tekanan peningkatan biaya operasional. Ketiga tujuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sistem manajemen keuangan pesantren era Society 5.0 tidak dapat dipahami hanya sebagai proses modernisasi administrative semata, melainkan sebagai bagian dari transformasi sosial ekonomi yang melibatkan perubahan pola pengelolaan lembaga, cara

berpikir ekonomi, dan strategi mempertahankan keberlangsungan pesantren di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompetitif. Dalam perspektif Weber, rasionalisasi formal berkaitan dengan penggunaan prosedur yang sistematis, terukur, dan efisien melalui penerapan teknologi akuntansi digital yang memungkinkan pesantren melakukan pencatatan keuangan secara lebih transparan, terstruktur, dan mudah diawasi, sehingga pengelolaan dana tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem tradisional yang bersifat manual. Proses ini menunjukkan adanya Upaya pesantren untuk meningkatkan efektivitas administrasi keuangan agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan profesionalitas lembaga pendidikan modern. Pengembangan unit usaha tidak hanya dipandang sebagai instrument memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat keberlanjutan pendidikan pesantren, membantu kebutuhan operasional santri, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Wakaf produktif menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi pesantren karena dikelola berdasarkan prinsip syariah dan orientasi kemaslahatan bersama, sehingga aktivitas ekonomi pesantren tetap memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Sementara itu, penggunaan *cashless system* menunjukkan adanya bentuk penyesuaian pesantren terhadap perkembangan transaksi digital yang semakin dominan dalam masyarakat modern, meskipun implementasinya sering kali dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya kelembagaan pesantren.

Transformasi manajemen keuangan pesantren pada era modern tidak selalu berlangsung secara linear menuju digitalisasi penuh sebagaimana yang terjadi pada lembaga pendidikan formal maupun institusi ekonomi modern lainnya. Setiap pesantren memiliki karakteristik, kultur organisasi, serta tingkat kesiapan sumber daya yang berbeda dalam merespons perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi administrasi keuangan. Pada Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto



sistem pengelolaan keuangan masih didominasi oleh mekanisme pembayaran tunai dan pencatatan yang bersifat konvensional, sehingga proses rasionalisasi formal melalui penerapan standar akuntansi digital, sistem administrasi berbasis aplikasi, maupun *cashless payment* belum terimplementasi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi kelembagaan pesantren tidak selalu identic dengan adopsi teknologi digital secara menyeluruh.

Meskipun demikian, tata kelola keuangan pesantren tetap berjalan melalui mekanisme sosial yang bertumpu pada nilai-nilai kepercayaan, kedekatan emosional, budaya gotong-royong, serta etos tradisional pesantren yang telah mengakar kuat dalam kehidupan komunitas santri dan pengelola pesantren. Dalam praktiknya, legitimasi pengelolaan keuangan pesantren lebih banyak diperoleh melalui kepercayaan kolektif masyarakat terhadap integritas pengasuh dan pengelola pesantren dibandingkan melalui instrumen digital atau sistem kontrol administratif modern. Dengan demikian, keberlangsungan sistem ekonomi pesantren tidak sepenuhnya tunduk pada logika kapitalisme modern yang berorientasi laba, melainkan tetap diikat oleh etos moral, solidaritas komunitas, dan nilai keberkahan yang menjadi fondasi utama kehidupan pesantren.

METODE

Penelitian dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali data secara langsung dari Lokasi penelitian, yaitu Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai latar belakang berdirinya pondok pesantren, tujuan awal didirikannya pondok, serta berbagai tantangan yang dihadapi pada masa awal perkembangan pondok dari waktu ke waktu, baik dari segi jumlah santri, sarana dan prasarana, kegiatan pendidikan, maupun program-program yang dikembangkan untuk mendukung kemajuan pesantren.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga menyoroti aspek pengelolaan keuangan pondok pesantren. Peneliti berusaha memahami bagaimana sistem pengelolaan keuangan dijalankan, mulai dari sumber pemasukan dana pondok, proses pencatatan dan penggunaan dana, hingga bentuk pengawasan atau pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan. Dengan wawancara langsung, peneliti dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci dan mendalam mengenai sistem pengelolaan yang diterapkan di pondok pesantren.

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan pendekatan sampel bertujuan. Informan ini dianggap memiliki pemahaman yang kuat atau partisipasi yang signifikan dalam administrasi keuangan pesantren. (Maela & Hanif, 2025). Informan tersebut mencakup Pengasuh Pondok, Bendahara, Santri yang terlibat usaha, Santri yang tidak terlibat usaha, dan Mitra Eksternal. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pendukung seperti Sejarah berdirinya pondok, pengelolaan keuangan pondok, unit bisnis, pembayaran uang pondok, dan lembaga yang bermitra dengan pesantren.

Informasi yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi diperiksa secara berurutan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan. Reduksi data melibatkan seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data untuk menyoroti informasi yang relevan. Selanjutnya, data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel agar memudahkan proses analisis lanjutan. Tahap akhir adalah menarik simpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan memahami fenomena yang diteliti secara utuh.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Pesantren dan evolusi sistem Keuangan

Wawancara dengan pengelola sekolah berasrama Islam mengungkapkan bahwa nama sekolah berasrama tersebut berasal dari harta wakaf yang disumbangkan kepada pengelola. Kepentingan umum dilayani oleh tanah wakaf, yang memastikan bahwa manfaatnya terus berlanjut. Namun, pembatasan formal belum mendukung evolusi ini sepanjang waktu. Buku-buku fiqh Islam tradisional yang diterbitkan berabad-abad yang lalu telah menjadi satu-satunya dasar kegiatan wakaf, meskipun banyak dari karya-karya tersebut tidak memadai saat ini. Akibatnya, pemerintah telah memprioritaskan pengorganisasian administrasi wakaf, penetapan kepastian hukum bagi para donatur, pengelola, dan penerima wakaf, serta promosi penggunaan aset wakaf yang efektif dan efisien yang tidak menghasilkan keuntungan (Christianto, 2027). Biasanya, kiai (ulama Islam) berperan sebagai fondasi tempat sekolah berasrama Islam tradisional berkembang. Mereka kemudian menerima dukungan, termasuk penyediaan aset tidak bergerak seperti tanah. Beberapa orang menawarkan bangunan. Sulit bagi sekolah berasrama Islam untuk berkembang tanpa wakaf (Muheramtohadhi & Na, 2022).

Pada awalnya hanya terdapat mushala kecil yang digunakan sebagai tempat mengaji masyarakat sekitar. Seiring berkembangnya jumlah santri, pesantren mulai membangun komplek asrama seperti Asyifa dan Azzahro serta fasilitas pendukung lainnya. Perkembangan pesantren tidak lepas dari perjuangan kiai dan dukungan masyarakat sekitar.

Pada tahap awal, sistem keuangan pesantren masih sangat sederhana dan berbasis kepercayaan. Sumber pendanaan utama berasal dari bulanan santri, donasi masyarakat, serta bantuan sukarela dari wali santri. Pengelolaan keuangan dilakukan secara manual oleh pengurus pesantren tanpa sistem administrasi kompleks. Model ini menunjukkan karakter ekonomi tradisional pesantren yang berlandaskan nilai Amanah dan gotong royong.

Dalam perkembangannya, pesantren mulai mengembangkan unit-unit usaha untuk menopang kebutuhan operasional. Unit usaha yang berkembang antara lain warung milik Ibu Nyai, kantin santri, koperasi, dan usaha kafe milik Gus Fuad. Pada tahap awal, usaha-usaha tersebut dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan internal santri dan pengurus agar aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat berjalan lebih efektif dan terjangkau. Namun, seiring bertambahnya jumlah santri serta meningkatnya kebutuhan operasional pesantren, unit-unit usaha tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Keberadaan unit usaha tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan internal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu pembiayaan Pembangunan fasilitas, operasional pendidikan, serta kegiatan sosial pesantren. Bahkan dalam beberapa kasus, unit usaha pesantren mulai melibatkan santri dalam proses pengelolaan sehingga menjadi sarana pendidikan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan ekonomi berbasis praktik langsung. Bahkan dalam beberapa kasus, unit usaha pesantren mulai melibatkan santri dalam proses pengelolaan sehingga menjadi sarana pendidikan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan ekonomi berbasis penerapan langsung.

Mengelola keuangan menjadi semakin sulit seiring dengan terus meningkatnya jumlah siswa (santri). Seiring kita memasuki era Masyarakat 5.0, banyak organisasi memikirkan kembali strategi pengelolaan sumber daya mereka mengingat peluang baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi. Untuk mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pendidikan terbaik, pesantren harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Agar pesantren dapat meningkatkan administrasi keuangan mereka dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, aplikasi keuangan digital sangat penting (Revolusi et al., n.d.).



2. Digitalisasi dan Transformasi Pengelolaan Keuangan Pesantren

Pengelolaan sumber daya keuangan sekolah yang terampil sangat penting bagi pesantren. Manajemen yang efektif dan efisien dimulai dengan perencanaan, kemudian berlanjut ke pengorganisasian, tindakan, dan akhirnya pengelolaan, dan mencakup sumber daya alam dan manusia. Pengelolaan ekonomi yang baik, sehat, halal (sah), dan bebas dari riba lebih penting daripada mencari keuntungan dalam hal pesantren (Kabupaten & Barat, t.d.). Seiring berjalannya waktu, pola pengelolaan asrama Islam secara bertahap akan mengadopsi pendekatan ini. Administrasi asrama Islam bertanggung jawab untuk memaksimalkan sumber daya lembaga, mengarahkan siswa menuju potensi penuh mereka, dan memperkuat ekonomi lokal. Asrama Islam menggunakan administrasi asrama Islam sebagai sarana untuk menjadi mandiri, memanfaatkan kebebasan wewenang yang mereka miliki (Aulia et al., 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dan pengelolaan keuangan, sistem pencatatan keuangan pesantren saat ini masih didominasi pencatatan manual dan pembayaran tunai. Digitalisasi belum diterapkan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana teknologi, dan kemampuan administrasi digital. Pengelolaan keuangan adalah setiap kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, pembiayaan dan pengelolaan asset dengan beberapa tujuan penting (Akuntansi, 2022)

Meskipun demikian, terdapat kesadaran dari pengelola bahwa penggunaan teknologi digital seperti aplikasi akuntansi dan sistem pembayaran *cashless* dapat meningkatkan efektivitas serta transparansi pengelolaan keuangan pesantren. Beberapa pengurus mulai memanfaatkan pencatatan sederhana menggunakan perangkat komputer atau telepon genggam untuk mendokumentasikan pemasukan dan pengeluaran pesantren.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berusaha menjaga transparansi keuangan melalui pelaporan kepada pengasuh dan pengurus inti pesantren. Laporan keuangan biasanya dibuat secara berkala sesuai kebutuhan internal pesantren, terutama ketika terdapat pembangunan dana dalam jumlah besar. Namun, pesantren belum memiliki sistem audit eksternal yang rutin dan standar operasional prosedur (SOP) tertulis yang lengkap dalam pengelolaan keuangan maupun unit usaha. Pengendalian internal lebih banyak didasarkan pada pengawasan langsung dari pengasuh pesantren dan nilai moral keagamaan.

Pondok pesantren telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan dan unit-unit usaha pesantren. SOP tersebut disusun untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penyusunannya, pihak yang terlibat adalah kepengurusan pondok pesantren, termasuk pengurus harian dan pihak yang bertanggung jawab terhadap unit usaha pesantren.

Salah satu contoh penerapan SOP tersebut dapat dilihat pada unit usaha studio foto di Pondok Pesantren Darul Abror. Unit usaha ini memperoleh bantuan modal dari Kementerian Agama sebesar sekitar 30-50 juta rupiah untuk pengembangan usaha yang mendukung kebutuhan pondok sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Dalam pengelolaannya, setiap penggunaan dana dicatat secara administratif dan dilaporkan kembali kepada Kementerian Agama sebagai bentuk akuntabilitas. Proses pencatatan dan pelaporan ini dilakukan oleh pengurus pondok yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan pengelolaan unit usaha. Dengan demikian, SOP yang diterapkan tidak hanya mengatur penggunaan dana, tetapi juga mengatur mekanisme pelaporan agar pengelolaan keuangan pesantren tetap transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Peran Santri dalam Unit Usaha Pesantren

Santri yang terlibat dalam unit usaha pesantren umumnya membantu pengelolaan warung, koperasi, atau usaha kebutuhan santri lainnya. Tugas mereka meliputi melayani pembeli, mencatat barang masuk dan keluar, serta menjaga operasional usaha harian. Keterlibatan santri tidak hanya bertujuan membantu usaha pesantren, tetapi juga menjadi sarana pendidikan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan hidup. Melalui keterlibatan tersebut, santri belajar mengenai tanggung jawab, disiplin, pelayanan, dan pengelolaan keuangan sederhana.

Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah berasrama Islam untuk memiliki administrasi yang baik agar memiliki basis keuangan yang kokoh. Sekolah berasrama Islam memiliki berbagai tanggung jawab manajemen, termasuk menetapkan arah keseluruhan sekolah, mengembangkan program ekstrakurikuler, dan mendorong kerja sama tim di antara siswa. Ini melibatkan memastikan bahwa manajemen memainkan peran strategis dengan mendorong siswa untuk mencapai tujuan sebagai anggota organisasi.

Namun demikian, sebagian santri mengaku belum memahami secara mendalam aliran keuangan unit usaha dan belum mendapatkan pelatihan formal terkait manajemen bisnis atau akuntansi. Pengetahuan mereka lebih banyak diperoleh melalui praktik langsung dan arahan pengurus pesantren.

Meskipun belum sepenuhnya profesional, model pembelajaran berbasis praktik ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem pendidikan ekonomi berbasis komunitas.

5. Persepsi Santri terhadap Kemandirian Ekonomi Pesantren

Santri pada umumnya merasakan manfaat keberadaan unit usaha pesantren, terutama dalam kemudahan memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Mereka juga melihat adanya perkembangan fasilitas pesantren yang

dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi pesantren.

Pembayaran kebutuhan santri masih banyak dilakukan secara tunai. Sistem pembayaran digital belum diterapkan secara luas sehingga aktivitas ekonomi pesantren masih bersifat konvensional. Meski demikian, sebagian santri menilai bahwa penggunaan sistem digital dapat mempermudah transaksi apabila diterapkan dengan baik.

Menurut Robingatur Richanah, seorang siswi di sekolah berasrama Islam, "kemandirian" berarti mampu mengurus kebutuhan dasar sendiri, termasuk makanan, pakaian, dan uang. Siswa belajar untuk mengandalkan diri sendiri melalui proses ini, yang membantu mereka mengembangkan karakter yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara, pembayaran di pesantren seperti syahriyah dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan dompet digital. Penggunaan dompet digital dianggap lebih praktis dan memudahkan wali santri maupun santri dalam melakukan transaksi pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi finansial.

Namun demikian, untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti makan di lingkungan pondok masih dominan menggunakan sistem tunai. Sementara itu, transaksi di luar lingkungan pesantren sudah mulai banyak menggunakan pembayaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran pesantren masih berlangsung secara bertahap. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pesantren mulai membuka diri terhadap modernisasi sistem keuangan tanpa sepenuhnya meninggalkan pola transaksi tradisional yang telah lama digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara, pembayaran di pesantren seperti syahriyah dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan dompet digital. Penggunaan dompet digital dianggap lebih praktis dan memudahkan wali santri maupun santri dalam melakukan transaksi pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya



bentuk adaptasi pesantren terhadap perkembangan teknologi finansial.

Namun demikian, untuk pembayaran kebutuhan sehari-hari seperti makan di lingkungan pondok masih dominan menggunakan sistem tunai. Sementara itu, transaksi di luar lingkungan pesantren sudah mulai banyak menggunakan pembayaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem pembayaran pesantren masih berlangsung secara bertahap.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa pesantren mulai membuka diri terhadap modernisasi sistem keuangan tanpa sepenuhnya meninggalkan pola transaksi tradisional yang telah lama digunakan.

Pesantren memiliki beberapa unit usaha yang dimanfaatkan oleh santri dan masyarakat sekitar, seperti layanan galon air dan jasa fotokopi/print. Berdasarkan hasil wawancara, harga yang ditawarkan unit usaha pesantren dinilai lebih terjangkau dibandingkan tempat di luar pesantren.

Selain harga yang murah, pelayanan yang diberikan juga memudahkan pengguna. Misalnya, layanan galon air dapat diantar langsung sampai depan komplek sehingga membantu kebutuhan santri secara praktis. Dari segi kualitas, jasa fotokopi dan print dinilai memiliki hasil yang baik dan memadai untuk kebutuhan pendidikan santri.

Keberadaan unit usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pesantren, tetapi juga menjadi bentuk pelayanan ekonomi yang mendukung kebutuhan internal pesantren.

Keberadaan unit usaha membuat pesantren menjadi lebih mandiri karena beberapa kebutuhan sudah dapat dipenuhi secara internal tanpa harus mengambil produk dari luar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren telah melakukan pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Manfaat keberadaan unit usaha juga dirasakan langsung oleh santri, terutama melalui harga layanan yang lebih murah dan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut memperlihatkan bahwa unit usaha

pesantren tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan pelayanan terhadap santri.

Santri secara umum tidak mengetahui secara rinci mengenai aliran dan pengelolaan keuangan pesantren. Informasi terkait penggunaan dana biasanya diketahui oleh pengurus pesantren, terutama bendahara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan pesantren masih bersifat terpusat pada struktur kepengurusan tertentu. Meskipun demikian, pola tersebut masih dianggap wajar dalam budaya organisasi pesantren yang menempatkan pengurus sebagai pihak yang dipercaya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai sosial keagamaan yang tetap dipertahankan dalam pengelolaan usaha pesantren.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren sedang mengalami transformasi dalam pengelolaan keuangan, dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern dan produktif. Pengembangan unit usaha telah menjadi strategi kunci dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren, sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan kewirausahaan bagi para siswa. Meskipun digitalisasi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya diterapkan, pesantren mulai menunjukkan upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Namun demikian, nilai-nilai kepercayaan, kerja sama timbal balik, dan budaya keagamaan tetap menjadi landasan utama tata kelola ekonomi pesantren. Pengembangan sistem administrasi yang lebih profesional, penyusunan prosedur operasional standar (SOP) tertulis, serta peningkatan literasi digital para pengelola merupakan langkah-langkah krusial untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan pesantren di masa depan.



Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pesantren diharapkan dapat meningkatkan manajemen keuangannya agar lebih profesional, transparan, dan terstruktur dengan menyusun prosedur operasional standar (SOP) serta secara bertahap menerapkan digitalisasi keuangan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya pesantren. Pengembangan unit usaha juga perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan berfungsi sebagai wadah untuk mengajarkan kewirausahaan kepada para siswa. Pengelola pesantren diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam manajemen keuangan, kewirausahaan, dan literasi digital agar pengelolaan unit usaha dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, siswa perlu diberikan pelatihan mengenai dasar-dasar bisnis dan manajemen keuangan sebagai landasan keterampilan hidup di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J. E. (2022). *No Title*. 7(April), 23–36.
- Aulia, E., Fuadah, S., Nasywa, M., & Ferida, R. (2025). *Peran Unit Usaha Pesantren dalam Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan dalam pembentukan karakter dan kepribadian santri . Disamping belajar agama , pesantren agar mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan . Melalui unit usaha mampu menopang kegiatan operasional tanpa bergantung sepenuhnya pada donasi . Dengan*. 2.
- Christianto, I. (2027). *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 10(01),91–106.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2027>
- Cover, J. (2025). *Table Of Contents*. 20(4).
<https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1356>
- Harjawati, T., Aisjah, S., & Ratnawati, K. (2026). Integrated business strategies in Islamic boarding School-based businesses: a qualitative phenomenological study on human resource management, cooperation, marketing, production, and finance businesses: a qualitative phenomenological study on human. *Cogent Business & Management*,13(1).<https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2607801>
- Kabupaten, N., & Barat, L. (n.d.). *A l a p a*. 11, 221–251.
- Maela, S. N., & Hanif, M. (2025). *Digitalisasi Manajemen Keuangan Pesantren melalui Implementasi Aplikasi CARDS*. 8(2).
- Muheramtohad, S., & Na, S. (2022). *Kemandirian Ekonomi Pesantren Ditinjau Dari Aset dan Operasionalnya*. 8(02), 1570–1576.
- Revolusi, S., Dalam, D. A. N. I., Di, P., Society, E. R. A., Ridwan, R., Lestari, D. F., Nurdin, A. M., & Nurfadilah, R. A. (n.d.). *Manajemen Pendidikan Dan Keuangan Untuk*. 7(2), 213–219.
- Ulya, F., & Nikmah, K. (2024). *Upaya Pesantren Dalam Menjaga Tradisi Sanad Keilmuan*. 14(1), 18–29.